

POTENSI KONFLIK DI NEGERI KATALOKA KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (Studi Kasus Tentang Relasi Sosial Antar Warga Masyarakat Pasca Pilkada 2024)

Oleh

Ridwan Rumatiga¹, T. D. Pariela², P. J. Pelupessy³, Jeffry E. M. Leiwakabessy⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pattimura Ambon

Email: ¹ridwanrumatiga003@gmail.com

Article History:

Received: 07-01-2026

Revised: 26-01-2026

Accepted: 10-02-2026

Keywords:

Potensi Konflik, Relasi Sosial, Antar Warga Masyarakat

Abstract: Perkembangan mengenai demokrasi di Indonesia pada saat ini yang dipotret melalui Pemilihan Kepala Daerah seperti pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terus mengalami pasang surut. Proses demokrasi langsung sebagai jawaban atas demokrasi tidak langsung yang pernah dilakukan dalam sistem politik di Indonesia menuntut Pemilihan Kepala Daerah seperti pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi langsung ini peran dan partisipasi rakyat sangat menentukan proses politik yang dibangun saat ini. Rakyat Indonesia yang dinyatakan telah memenuhi syarat dalam Pemilu, Pilkada, maupun Pileg, memiliki peran sangat penting dalam menentukan pilihannya. Kondisi yang sering dihadapi seperti ini seringkali menyebabkan relasi sosial antar warga pada masa sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun sesudah Pilkada kurang harmoni. Konflik antar warga di Kabupaten Seram Bagian Timur seringkali terjadi pada masa sebelum maupun sesudah Pilkada. Pada awalnya relasi sosial antar warga di daerah ini baik karena mereka adalah orang basudara, tetapi kemudian berubah setelah berlalunya Pilkada

PENDAHULUAN

Dinamika politik yang berkembang pada era reformasi di Indonesia, sering menimbulkan konflik dikalangan masyarakat, karena persoalan ini berkaitan dengan kepentingan politik yang berbeda dikalangan elite dan massa yang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Akibat konflik yang tidak terkelola secara baik, dan terjadi pada pendukung salah satu kandidat dengan kandidat yang lain telah menimbulkan kesenjangan sosial, baik sebelum Pilkada maupun pasca Pilkada. Berbagai potensi konflik atau konflik latent yang terdapat dalam masyarakat kemudian muncul sebagai konflik terbuka antar individu maupun antar kelompok sosial apabila memasuki masa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Persoalan yang dianggap menarik perhatian dari proses ini adalah usaha mengetahui sebab-sebab konflik yang berbeda pada setiap masyarakat. Begitu banyak pengalaman pahit pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia di mana konflik yang muncul pada saat Pemilukada tidak hanya terjadi persaingan politik dari para kandidat, tetapi potensi konflik yang berada pada lingkungan lokal sering menimbulkan konflik terbuka

pada era sebelum Pilkada. Secara sosiologis, dapat diduga bahwa konflik terbuka yang terjadi dikalangan masyarakat pasca Pilkada, sebenarnya berakar dari potensi konflik yang sudah ada sebelum proses Pilkada yaitu pada masa kampanye. Walaupun disinyalir bahwa potensi yang dialami oleh masyarakat tidak seluruhnya berkaitan dengan Pilkada dimaksud sebagai pemicu konflik antar warga, tetapi bisa saja ada persoalan lain yang menjadi potensi konflik sebelumnya. Persoalan yang teridentifikasi melalui proses pengamatan awal antara lain kesadaran masyarakat terhadap pemahaman politik masih jauh dari harapan, terutama berkaitan dengan suka atau tidak suka terhadap keinginan seseorang atau kelompok masyarakat dalam melihat calon pemimpin mereka kalah dalam proses pemilihan umum. Belum ada pendidikan politik yang baik dikalangan warga. Artinya boleh jadi hal ini juga merupakan penyebab utama, tetapi boleh juga merupakan penyebab utama, dari sebuah proses konflik yang akar penyebabnya sudah ada jauh sebelum hal tersebut terjadi.

Sejalan dengan itu, kondisi yang seringkali dialami oleh masyarakat setelah pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, hubungan kekerabatan antara sesama sangat terjalin dengan baik, kemudian Semenjak demokrasi lokal bergulir, yaitu; pesta rakyat atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dipilih langsung oleh rakyat. Menghadapi pesta rakyat yang dilakukan pertama kali di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2005-2010, hubungan kekerabatan pada saat itu belum terlalu parah. Memasuki bulan juli tahun 2010 pesta demokrasi yang ke dua untuk memilih pemimpin di Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 2010-2015, pada saat itu kandidat yang mengikuti pemilihan tersebut terdiri dari dua pasangan calon yakni Abdul Mukti Keliobas - Yusuf Rumatoras dan Abdullah Vanath - Sitti Umuriah Suruwaky. Kandidat yang menang dalam pemelihan tersebut adalah Abdullah Vanath - Siti Umariah Suruwaky.

Berdasarkan gambaran tentang kondisi konflik yang terjadi pada era Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur di atas kemudin menjelang pesta demokrasi yang ke tiga Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2015, maka proses Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada dasarnya berjalan cukup lancar, aman, walaupun ada beberapa masalah mulai memanas seperti terjadi perkelahian antara sesama pendukung, saling menghujat, pengusiran terhadap anggota KPUD di salah satu TPS, aparat pemerintah yang tidak bertindak netral, namun tidak sampai mengganggu proses Pilkada. Kondisi menjelang tahap penghitungan suara sangat mendapat perhatian besar dari pendukung atau simpatisan masing-masing calon, pendukung MK-FAHRI dan SUS-GO di mana saling mengklaim mendapat suara terbanyak namun menjelang akhir penghitungan suara, banyak berita yang menyuguhkan hasil sementara. Setelah itu KPUD melakukan penetapan hasil penghitungan suara yang unggul adalah MK- FAHRI, kemudian pihak yang merasa kalah (SUS-GO) tidak bersedia untuk menandatangani berita acara. Hal ini membuat pendukung MK-FAHRI melampiaskan kegembiraan. Sebaliknya, pendukung SUS-GO berusaha mengecek dan meneliti, dan menemukan kesalahan yaitu pada daerah basis MK-FAHRI yakni Negeri Kataloka setelah dikoreksi ternyata tidak mempengaruhi perolehan suara. Kubu SUS-GO sangat kecewa. Mereka yakin menang, ini didasarkan pada kenyataan bahwa SUS-GO memiliki dana yang lebih besar, serta pengalaman yang lebih banyak sebagai penguasa sebelumnya karena memiliki jaringan birokrasi yang luas, dan aparat pemerintah diyakini memihak pada kandidat tertentu. Namun hasil penghitungan suara akhir menunjukkan pasangan MK-FAHRI menang. Setelah itu mereka yang merasa kalah menindaklanjuti

gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan SUS-GO. Setelah mereka merasa kalah, kemudian mereka menebarkan opini melalui janji-janji kepada masa pendukung sehingga menciptakan disharmoni antara sesama pendukung, dan akibat dari kerenggangan hubungan yang terjadi di antara masyarakat pendukung, kemudian menimbulkan konflik yang baru antar pendukung.

Perlakuan sewenang-wenang oleh orang atau kelompok lain yang diderita oleh seseorang atau sebuah kelompok atau masyarakat, bila tidak mampu diatasi dalam bentuk perlawanan oleh yang diperlukan sewenang-wenang akan membekas dalam bentuk kebencian tersebut pada waktu terjadinya peristiwa tersebut akan disimpan atau terpendam didalam hati, karena tidak berani atau tidak mampu untuk melawannya. potensi konflik dapat terjadi karena keretakan hubungan antaraan anggota kelompok, mengakibatkan perubahan keperbadian pada individu, mengakibatkan kerusakan harta benda dan nyawa manusia, menimbulkan dominasi atau penaklukan oleh salah satu.

Olehnya itu proses pemilukada boleh selesai atau berakhir tetapi suasana potensi konflik akan terus terjadi dan merupakan sebuah realitas yang sangat mungkin akan terjadi sampai berakhir masa kepemimpinannya. Dari gambaran di atas inilah sesungguhnya yang melatar-belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang Potensi Konflik Di Seram Bagian Timur (Studi Tentang Relasi Sosial Antar Warga Masyarakat pasca Pilkada 2015 di Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom).

LANDASAN TEORI

1. Modal Sosial

Kenyataannya bahwa modal sosial merupakan transformasi penting dalam kehidupan kita, berarti semakin banyak anda mengenal orang dan semakin banyak memiliki kesamaan cara pandang dengan mereka, maka semakin kaya modal sosial anda. Sejalan dengan itu pemahaman tentang modal sosial dalam analisis Sen (2007:4) mengemukakan bahwa perhatian pada identitas tertentu bisa mempererat pertalian dan membuat kita bersedia melakukan berbagai hal satu sama lain dan turut membawa kita hidup yang berpusat pada diri sendiri dan kelompok. Selanjutnya juga dikemukakan oleh Sen dalam kepustakaan mutakhir tentang modal sosial, yang dikupas secara cermat oleh Robert Putnam dan beberapa pemikir lainnya, menunjukkan dengan cukup jelas bagaimana

Kesamaan identitas dalam satu komunitas dapat membuat kehidupan pada komunitas tersebut jauh baik, di mana rasa keterikatan suatu komunitas itu dipandang sebagai suatu sumberdaya yang layak sebagai modal sosial. Sehubungan dengan itu dari perspektif modal sosial mungkin saja dianggap relefan dalam kajian tersebut. Dalam kaitan itulah maka Mo Cox (1995), mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang dengan jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebijakan bersama.

Selanjutnya menurut Robby Djohan (2007), mengemukakan bahwa modal social adalah suatu keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bpaergerak untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam prosesnya, gerakan itu ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang khas yaitu trust saling memberi dan menerima, teloransi, penghargaan, pastisipasi, kerjasama dan proaktif, serta nilai-nilai positif yang dapat membawa kemajuan

bersama.

2. Jaringan social

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu, organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik atau struktur sosial yang di dalamnya ada aktor sosial, yaitu individu atau organisasi tertentu dan satu set hubungan antar aktor-aktor tersebut. Istilah ini diperkenalkan oleh Prof. J.A. Barnes (1954), mengatakan bahwa sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu maupun organisasi. Istilah jejaring sosial ini akan membuat mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga yang bisa saling berhubungan. Jejaring pada hakekatnya lebih memfokuskan pada aspek ikatan antara simpul yang bisa dilakukan, simpul tersebut berupa individu atau kelompok (organisasi).

Fukuyama (1995), mendefinisikan jejaring atau jaringan sosial adalah suatu upaya melakukan kerjasama yang ada dalam modal sosial dalam rangka membentuk organisasi dimana para anggotanya secara sukarela menyerahkan sebagian hak-hak individunya untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan, berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Kesepakatan yang terjadi tersebut menyebabkan setiap orang atau individu melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bebas tanpa perlu diawasi, karena satu sama lain menaruh kepercayaan bahwa setiap orang akan melaksanakan kewajibannya.

3. Saling Percaya

Kepercayaan berasal dari kata percaya artinya mengaku atau meyakini akan kebenaran. Bahwa kepercayaan mengandung pengertian yaitu pertama teori koherensi suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, kedua teori pragmatis kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Bersifat koheren atau konsisten berarti kebenaran itu bisa dibenarkan kepada seseorang kita seseorang itu percaya kepada sesuatu yang dirasa atau dilihat berdasarkan pandangannya, oleh karena itu kepercayaan itu bisa terjadi ketika kedua belah pihak itu dapat menyepakati dan dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya.

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Noorman, 1993).

Selanjutnya menurut Rousseau et al (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan dapat diartikan kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya.

4. Norma Sosial

Secara harfiah pengertian norma sosial pedoman atau ketentuan dan acuan yang menjadi keharusan bagi para anggota masyarakat dan segala obyek yang menjadi milik

masyarakat tersebut untuk mengikat dan mematuhi serta mengakui dan sekaligus memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti, mematuhi dan mengakui pedoman tersebut. Norma sosial itu segala ketentuan yang sifatnya mengikat dan mengatur masyarakat agar dapat menciptakan keserasian fungsi sosial di dalam masyarakat, sehingga melahirkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap manusia bergaul pasti memiliki aturan atau batasan-batasan, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari agar tidak menjadi sorotan dalam masyarakat. Norma merupakan segala bentuk aturan yang berisikan perintah dan larangan atau perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan oleh setiap manusia dan sifatnya mengikat masyarakat. Menurut Robert R. Lawang (1996:21), mengatakan norma merupakan suatu patokan dalam berperilaku yang memungkinkan seseorang menentukan apakah tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain yang juga merupakan ciri bagi orang lain untuk menolak atau mendukung dari perilakunya.

Senada yang disampaikan oleh Soejono Soekanto (1995), bahwa norma adalah sebuah perangkat dimana hal itu dibuat agar hubungan di dalamnya suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma tersebut diakui, dihargai, dikenal dan ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa norma merupakan pedoman dan aturan yang menyatakan bagaimana cara seseorang individu layaknya bertindak dalam situasi tertentu.

5. Solidaritas Sosial

Sehubungan dengan itu solidaritas sosial yang mana di dalam sebuah persatuan terdapat sebuah kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Situasi solidaritas sosial akan menjadi lemah bila ikatan-ikatan yang mengikat mereka menjadi rapuh dan semakin tidak berfungsi. Hal itu disebabkan kurang intensifnya pemeliharaan ikatan emosional mereka atau adanya propokasi dari pihak luar yang mempengaruhi dan merusak keterikatan itu dapat dicegah. Situasi tertentu solidaritas akan menguat sehingga benar-benar terbentuk kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Solidaritas juga merupakan bagian dari kekuatan hubungan antar individu yang diciptakan dalam kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan proses, pembentukan individu untuk menjalin hubungan yang kuat dalam membentuk rasa persaudaraan antar individu.

Solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim (*dalam* Lawang, 1994:181) mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada hubungan antara individu dan kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan mendukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional sehingga mampu memperkuat hubungan antar mereka.

Sejalan dengan itu menurut Paul Jhonson (Lawang, 2012:189), solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antar individu atau kelompok yang didasarkan kepada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, diperkuat oleh pengalaman emosional bersama sebagaimana dikemukakan oleh Lawang (2012:186), dalam bukunya bahwa dasar

pengertian solidaritas adalah kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama diantara para anggota.

6. Kohesi Sosial

Kohesi sosial (*social cohesion*) dapat didefinisikan sebagai perekat yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kemasyarakatan, klan dan *genealogi* dalam bingkai etnik. Secara tipologis kohesi sosial dapat dikategorikan secara kasar kedalam dua tipe, yaitu kohesi sosial intra masyarakat dan kohesi sosial antar masyarakat. Kohesi sosial intra masyarakat secara historis berbentuk melalui suatu mekanisme pembentukan sosio/kultur dalam suatu masyarakat tunggal (*single society*). Masyarakat tunggal lazimnya menempati satu wilayah mukim atau beberapa wilayah mukim tetapi memelihara tata adat dan tata sosial yang sama. Tata adat dan tata sosial yang sama itu menjadi panduan berinteraksi. Dalam masyarakat tunggal tertentu perekat ini ditentukan oleh jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dominan seperti petani atau nelayan.

Kohesi sosial antar masyarakat secara historis terbentuk melalui pertemuan sosial secara lintas masyarakat. pertemuan sosial ini terbentuk oleh ada saling ketergantungan kemudian membentuk suatu mekanisme sosial saling membantu. Jika kohesi intra sosial masyarakat terbentuk melalui mekanisme interaksi sosial dalam suatu masyarakat yang tunggal yang didorong oleh kesadaran kekerabatan, kohesi sosial antar masyarakat lebih pada mekanisme pragmatis ekonomis. Secara teologis, kultural kohesi sosial antar masyarakat mungkin dibentuk oleh semangat pertetanggaan dan saling bantu yang diolah dari sumber-sumber tata adat mengenai etika dan persamaan makhluk. Pada tingkat ini kohesi sosial sungguh dapat dilihat dalam dua sudut pandang pertama kohesi sosial adalah sebuah perekat yang secara fungsional merupakan kondensasi atau tepatnya kristalisasi dari adanya kesamaan famili, etnik, klan, kesamaan nasib, orientasi budaya, tujuan sosial, *social glue*, jarak sosial, dan lainnya.

7. Kedamaian Sosial

Konsep modal kedamaian sosial kiranya sangat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai arti “modal” (*capital*) seperti halnya pada “modal finansial” (*financial capital*), “modal manusia” (*human capital*) dan “modal sosial” (*social capital*). Sementara itu para ilmuwan sosial sering mengartikan modal manusia sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu, sedangkan modal sosial kerap dimaknakan sebagai keadaan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan, norma-norma dan kepercayaan (*trust*) yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat (Blakeley dan Sugate, 1997; Riddell, 1997; Obrien, 1997; Barker, 1997).

Di samping itu modal kedamaian sosial pada dasarnya merujuk pada sumber atau potensi yang timbul dari proses interaksi antara individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam konteks ini. Modal kedamaian sosial muncul bukan hanya pada saat orang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan umum, melainkan pula manakala terdapat kebebasan berserikat, relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan serta adanya dialog dan komunikasi yang efektif diantara berbagai segmen masyarakat. Secara teoritis pengukuran konsep modal kedamaian sosial tidak selalu melibatkan pengukuran interaksi-interaksi itu sendiri, melainkan lebih pada pengukuran dari hasil interaksi-interaksi tersebut, seperti terciptanya kohesivitas, diantara masyarakat yang bersangkutan.

8. Mediasi

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai (dikutip Gatot Nursumartono Media Indonesia halaman 21) “kenderaan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Sesuai definisi tersebut, mediator dianggap sebagai “kenderaan” bagi pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan. Oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui mediasi akan permanen dan menyenangkan bagi kedua pihak yang mengakhiri sengketa atau yang berselisih.

Sudah Nampak jelas bahwa mediasi berfungsi sebagai mendefinisikan problem (*scoping mediaton*), menyelesaikan sengketa (*dispute settlemen mediaton*), mengelolah masalah (*problema cotaintment mediaton*), merumuskan kebijakan (*policy making mediaton*) dan mencegah konflik (*preventive mediaton*). Fungsi diatas dapat dinyatakan bahwa mediasi akan dapat mengurangi dampak dari potensi konflik yang merupakan salah satu karakter masyarakat pluralism. Dengan demikian mediasi dapat menawarkan perbedaan dalam menangani konflik dengan cara mampu membangun nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat yang bertikai atau berselisih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penjelasan dan analisis fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan kunci, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau terlibat secara langsung dalam masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran tentang Potensi Konflik Di Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Studi Kasus Tentang Relasi Sosial Antar Warga Masyarakat Pasca Pilkada 2015, maka peneliti melakukan observasi di lapangan. Pendekatan ini di ikuti dengan wawancara kepada informan, dan hasilnya akan diuraikan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang diteliti diukur melalui beberapa dimensi sebagai berikut :

1. Potensi Konflik Sebelum dan Sesudah Pilkada

Secara teoritis, realita yang kerap terjadi karena sumber konflik sangatlah bervariasi dan kompleks. Konflik sosial kerap terjadi, misalnya dari kehidupan ekonomi, pendidikan, hukum, pemerintahan, budaya, kehidupan beragama, politik, lingkungan, sumber daya alam, ketertiban dan keamanan serta unsur-unsur kepentingan lainnya. Berikut ini merupakan

penjelasan dari informan bapak Husni Kilwow (66 tahun) yang mengatakan bahwa;

“Yang menjadi akar persoalan adalah akumulasi dari Pilkada 2010 di Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana proses yang terjadi yakni para kandidat dan tim pemenang mencari dukungan politik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh pemuda yang memiliki kekuatan basis pada masyarakat. Keterlibatan mereka secara langsung dapat mempengaruhi setiap orang yang nantinya ikut memilih. Banyak opini yang akan muncul, dari setiap pendukung terhadap kandidat yang akan mereka pilih. Setiap pendukung pastinya akan menyebarkan berbagai informasi yang menurut mereka orang lain pun akan terkesan dengan kandidat yang mereka pilih (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun)”.

Sejalan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Negeri Kataloka dalam masa Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur ini, kemudian dikaitkan dengan penjelasan dari informan yaitu bapak Muh Najam Tuhuteru (58 tahun) mengatakan bahwa;

“Adanya janji politik dari tim pemenangan dari pasangan calon Bupati yang memberikan harapan-harapan sehingga membuat pendukung menjadi percaya bahwa kandidatnya yang terbaik. Jika ada lawan yang dengan sengaja membicarakan atau menghujat kandidatnya maka mereka tidak segan-segan melakukan tindakan dan ancaman terhadap lawan politik. Hal yang dilakukan merupakan bentuk dukungan demi meloloskan kandidat yang mereka pilih (Wawancara dengan bapak Muh Najam Tuhuteru, 58 tahun)”.

Dalam masa kampanye Pilkada biasanya ada janji politik dari tim pemenang pasangan calon yang memberikan harapan-harapan sehingga membuat pendukung menjadi percaya bahwa kandidatnya yang terbaik. Terjadi kemudian yaitu, apabila ada lawan politik yang secara sengaja membicarakan atau menghujat kandidat dari lawan politik, maka mereka sebagai masa pendukung kandidat sebagai lawan tidak segan-segan melakukan tindakan dan ancaman terhadap lawan politik mereka. Hal ini dapat saja dilakukan oleh masyarakat sebagai pendukung salah satu kandidat karena di dalam pemikiran dari masa pendukung yang telah diberikan, maka mereka akan memperjuangkannya agar kandidat tersebut lolos atau berhasil dalam Pilkada.

2. Kecemburuan Sosial

Adanya faktor kecemburuan sosial yang kuat dalam masyarakat, dianggap sebagai penyebab timbulnya konflik antar warga di Negeri Kataloka. Hal ini dikemukakan oleh informan bahwa :

“Pilkada selalu membuat kehidupan kita dilematis, dan diantara sesama warga menjadi kehidupan yang terasing antar satu dengan yang lain di negeri kami sendiri. Kita bisa lihat ketika adanya Pilkada maupun Pileg banyak sekali pertentangan atau orang bakali yang menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat. Konflik menyebabkan warga yang diantaranya ada perbedaan pendapat, bahkan terjadinya kecemburuan sosial antara sesama simpatisan pasca Pilkada, dan hal ini disebabkan oleh ego dari masing-masing orang yang tetap mempertahankan apa yang menurut mereka itu baik (Wawancara dengan bapak Muh Najam Tuhuteru, 58 tahun, masyarakat)”.

Namun kemudian mereka ini kalah bersaing dalam Pilkada. Artinya situasi seperti ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sendiri belum siap, dan disiapkan oleh partai politik untuk menghadapi situasi politik pada era Pilkada, Pileg, dan kondisi setelah pelaksanaan

Pilkada, maupun Pileg tersebut menjadi pemicu sehingga konflik tertutup sehingga terus berkembang, dan bisa menjadi konflik terbuka diantara warga. Berikut ini penjelasan dari informan yaitu;

"Menyongsong Pilkada, maupun Pilek tentunya ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik secara internal maupun eksternal, dan itu merupakan konsekuensi yang harus dihadapi bersama dan sejauh ini, belum ada keputusan-keputusan adat terkait persoalan-persoalan perdata yang tidak tuntas sehingga menimbulkan antipati terhadap pihak yang merasa dirugikan sehingga ada kesempatan melalui Pilkada maupun Pileg itu dapat muncul seketika (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)".

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat bahwa, banyak sekali persoalan yang belum ada keputusan-keputusan adat terkait persoalan-persoalan perdata yang tidak tuntas. Kondisi ini sering menimbulkan antipati terhadap pihak yang merasa dirugikan, dan menjadi bagian yang melekat dengan akar konflik potensial di Negeri Kataloka, meliputi persoalan tanah yang terjadi diantara warga, dan kecemburuan yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik terbuka apabila masyarakat berada pada masa Pilkada maupun Pileg di Negeri Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan khususnya di Negeri Kataloka, seperti dikemukakan oleh informan bahwa;

"Dalam Pilkada tentunya ada yang menang ada yang tidak menang. Lazimnya kandidat yang tidak menang, mereka tidak menerima kalau mereka itu tidak lolos dalam arti, tidak ada pengakuan dari pihak yang dianggap kalah dalam proses pilkada, karena ada janji-janji dan harapan bahwa mereka masih berpeluang menang. Kondisi seperti ini kemudian menciptakan berbagai situasi yang tidak kondusif, karena masih terbayang dengan harapan-harapan baik dari calon maupun yang memilih (Wawancara dengan bapak Nurjen, 46 tahun, masyarakat)".

Tentunya dalam pelaksanaan Pilkada, ada yang menang dan ada yang tidak menang (kalah). Persoalan yang muncul kemudian yaitu, kadang kala ada kandidat yang tidak menang, maka mereka sebagai pendukung kandidat yang kalah tidak menerima kalau kandidat mereka itu tidak lolos dalam Pilkada. Dalam arti, tidak ada pengakuan dari pihak yang dianggap kalah dalam proses Pilkada. Apabila terjadi kondisi seperti ini maka janji-janji politik yang menjadi harapan dari warga pendukung yang tidak dapat diwujudkan oleh kandidat yang kalah.

3. Pemekaran Desa di Negeri Kataloka

Suatu persoalan yang dianggap memiliki potensi konflik antar warga di Negeri Kataloka yaitu kelompok yang berjuang untuk pemekaran desa. Isu ini biasanya menguat pada masa sebelum Pilkada, di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai isu pemekaran desa juga merupakan potensi konflik yang terdapat pada lingkungan masyarakat Negeri Kataloka yaitu;

"Awal mula pemekaran Dusun Rumeon menjadi desa administrasi adalah keinginan Bupati Abdullah Vanath dalam hal ini untuk kepentingan politiknya di mana terjadi pro dan kontra antar warga ada yang menolak, namun Bupati dengan kekuasaan yang dimilikinya tetap memaksa untuk memekarkan dusun tersebut menjadi desa administratif tanpa meminta persetujuan atau pengakuan dari Negeri Kataloka sebagai desa induk. hal ini yang menyebabkan terjadi gesekan antara sesama warga, yang kemudian

bermusuhan pada Pilkada (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)”.

Namun Bupati dengan kekuasaan yang dimilikinya tetap memaksa untuk memekarkan dusun tersebut menjadi desa administratif tanpa meminta persetujuan atau pengakuan dari Negeri Kataloka sebagai negeri adat atau negeri induk. Kondisi ini kemudian menyebabkan gesekan yang makin tajam antara sesama warga. Mereka yang terdiri dari orang-orang yang pro dan kontra terhadap pemekaran desa kemudian saling menghujat dan bermusuhan pada Pemilukada. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan yaitu;

“Setelah Kabupaten Seram Bagian Timur dipimpin oleh Abdullah Vanath sebagai Bupati pertama yang kemudian memekarkan beberapa desa. Ada beberapa Pemerintah Negeri yang memberikan izin sebagian anak dusun menjadi desa administratif. Begitu juga ada anak dusun yang tidak mau dimekarkan menjadi desa administratif. Kondisi ini menyimpan potensi konflik, sampai pada Pemilukada berikut, maupun Pilek (Wawancara dengan bapak Muh Najam Tuhuteru, 58 tahun, masyarakat)”.

Peristiwa yang berkaitan dengan pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dipimpin oleh Abdullah Vanath sebagai Bupati pertama, kemudian memekarkan beberapa desa. Ada beberapa Pemerintah Negeri yang memberikan izin sebagian anak dusun menjadi desa administratif. Namun kondisi ini kemudian menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena proses tersebut tidak melibatkan masyarakat.

4. Relasi Sosial Yang Tercipta Antara Sesama Warga

Usaha memahami tentang relasi sosial antar warga yang menyimpan potensi konflik masih terus berlangsung di Negeri Kataloka. Mengenai kondisi ini dikemukakan oleh informan bahwa;

“Katong punya keadaan sebelum pemekaran desa, hubungan sosial antar sesama warga sebagai orang basudara sangat harmonis sekali, saling mendukung dalam setiap kegiatan yang ada di dusun, baik itu pembangunan rumah warga maupun kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Hubungan itu muncul sebagai rasa kebersamaan yang terpintal dalam kehidupan bersama, hal ini dikarenakan mereka menyadari sungguh bahwa mereka berada dilingkungan yang sama dan mengharuskan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, baik itu berupa isu yang dikembangkan pada waktu sebelum maupun sesudah Pilkada, maupun Pileg (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)”.

Sebelum itu, hubungan sosial antar warga yang muncul sebagai rasa kebersamaan yang telah terpatrit dalam menjalani kehidupan bersama di Negeri Kataloka makin terusik. Masyarakat menyadari sungguh bahwa mereka berada pada dilingkungan yang sama, sehingga mengharuskan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan sosial ini secara baik. Namun menjelang dan sesudah Pilkada maka moment ini masih saja meninggalkan cacat pada masyarakat dan kondisi ini menyebabkan mereka tidak berdaya untuk mengatasinya. Penjelasan dari informan bahwa;

“Banyak hal yang terjadi saat ini setelah pemekaran desa salah satunya, kebersamaan yang selama ini terbina dengan baik, secara perlahan-lahan menjadi renggang pihak yang sesudah mekar menganggap bahwa mereka sudah berdiri sendiri apa yang mereka lakukan seakan-akan tidak ada hubungan lagi dengan desa induk. Ketidak pedulian

diantara berbagai pihak sangatlah mempengaruhi kehidupan bersama (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)".

Dewasa ini banyak sekali persoalan yang dialami oleh masyarakat, dan terjadi setelah pemekaran desa. Kebersamaan hidup sebagai *orang basudara* yang selama ini terbina dengan baik, secara perlahan-lahan menjadi renggang. Bagi anggota masyarakat yang berada pada pihak desa yang sesudah mekar menganggap bahwa mereka sudah berdiri sendiri.

5. Isu-Isu Politik yang Dikembangkan Oleh Elit Politik

Berkaitan dengan dengan berkembangnya isu-isu politik yang dilakukan oleh elit politik dikemukakan oleh masyarakat bahwa;

Ketika kita dihadapkan dengan Pilkada ada himbaun- himbaun yang sudah disampaikan selain menciptakan suasana Pilkada denga aman, warga juga harus konsisten dalam menentukan pilihan yang tepat, jika salah menentukan maka akan tertinggal lima tahun. Sebab dalam proses pemilihan setiap orang hanya diberikan kesempatan satu kali saja untuk bisa memilih salah satu pemimpin yang mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)".

Namun perlu disadari bahwa, dalam proses pemilihan setiap orang hanya diberikan kesempatan satu kali saja untuk bisa memilih salah satu pemimpin yang mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Situasi ini yang sering menimbulkan keresahan setelah pelaksanaan Pilkada di Negeri Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk itu berikut penjelasan dari informan bahwa;

"Dalam proses pemilihan masyarakat sudah harus mempertimbangkan siapakah pemimpin yang pantas untuk dipilih. Pemimpin yang benar-benar terbebas dari berbagai masalah, pimpinan yang bersih, dan jangan pilih pimpinan yang korupsi karena ini akan mengancam kepemimpinannya kelak. Disisi lain seorang pemimpin yang telah dipercayai untuk memimpin, harus benar-benar transparan, dan jangan pernah ragu dalam mengambil sebuah keputusan jika itu menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat (Wawancara dengan bapak Nurjen, 46 tahun, masyarakat)".

Dikemukakan sesuai pemahaman masyarakat bahwa, dalam proses Pilkada masyarakat sudah harus mempertimbangkan siapakah pemimpin yang pantas untuk dipilih. Mengenai cara menentukan pemimpin yang benar-benar terbebas dari berbagai masalah, pimpinan yang bersih, dan jangan pilih pimpinan yang korupsi karena ini akan mengancam kepemimpinannya dikemudian hari.

6. Partisipasi Politik Warga Dalam Pilkada

Patisipasi politik dari masyarakat Negeri Kataloka dalam Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebenarnya cukup positif. Namun kondisi yang terkait dengan potesi konflik yang terdapat dalam masyarakat menyebabkan pertikaian antar warga dalam masa Pilkada sering terjadi. Hal ini dikemukakan oleh informan bahwa;

"Warga akan ikut berpartisipasi dengan baik jika dapat melihat kehidupan keluarganya maupun kehidupan kelompok. Tetapi ego dari masing-masing orang maupun kelompok yang sangat kuat terhadap kandidat yang berasal dari negerinya itu memberikan semangat di mana partisipasi warga yang semakin meningkat karena mereka ingin memikat kandidat dalam pelaksanaan Pilkada untuk memenangkan kandidat tersebut dengan dukung penuh (Wawancara dengan bapak Muh Najam Tuhuteru, 58 tahun,

masyarakat)".

Selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur, warga ikut berpartisipasi secara baik. Namun kenyataan yang seringkali dialami yaitu mereka lebih melihat kehidupan keluarganya mampu kehidupan kelompok. Sikap egois yang bersifat sektoral sangat kuat terhadap kandidat yang berasal dari negerinya.

7. Cara-Cara yang Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Memelihara Perdamaian

Cara yang dilakukan selama ini untuk memelihara damai dalam masyarakat menurut informan yaitu;

"Dilakukan pendekatan sosial oleh berbagai tokoh dilakukan secara individu, maupun kelompok dengan cara kekeluargaan. Pendekatan sosial secara kekeluargaan yang dilakukan oleh tokoh pemerintah negeri/desa setempat terutama Raja, dipercaya dapat membangun kesadaran bersama antar sesama warga setempat yang pernah terlibat konflik, dan di Negeri Kataloka ini Raja sebagai Pemerintah Negeri sangat dihormati (Wawancara dengan bapak Nurjen, 46 tahun, masyarakat)".

Pendekatan sosial sebagai cara memelihara damai dalam masyarakat dapat dilakukan secara individu, maupun secara kekeluargaan. Menurut pandangan dari masyarakat di Negeri Kataloka bahwa, pendekatan sosial yang dilakukan oleh tokoh Pemerintah Negeri Kataloka (Raja) dipercaya dapat membangun kesadaran bersama antar sesama warga setempat yang pernah terlibat konflik, karena Raja adalah Kepala persekutuan adat. Hal ini lebih lanjut dikemukakan oleh informan bahwa;

"Seluruh warga perlu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di desa/negeri. Misalnya kegiatan berupa kerja bakti di negeri, semua pihak perlu diajak untuk ikut dalam kegiatan dimaksud secara bersama. Melalui cara ini maka secara perlahan-lahan hubungan sosial diantara mereka dapat tumbuh secara baik, dan rasa kepercayaan antara sesama warga yang berkonflik dapat dikembalikan seperti keadaan sebelumnya. Masyarakat di Negeri Kataloka ini memerlukan cara pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, dan keagamaan. Pendekatan lain yang dilakukan melalui kegiatan Pengajian bersama antara ibu-ibu Majelis Taklim misalnya, secara bergiliran pada setiap minggu dapat membangun kesadaran baru untuk menjalani hidup diantara warga secara rukun, saling menghormati, begitu juga pada organisasi keagamaan lainnya yang berada dalam Negeri Kataloka (Wawancara dengan bapak Husni Kilwow, 66 tahun, tokoh agama)".

Untuk memelihara harmoni sosia agar dapat menjalani hidup secara damai dikalangan warga, maka seluruh warga perlu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di negeri atau desa. Misalnya kegiatan berupa kerja bakti di Negeri Kataloka, semua pihak perlu diajak untuk ikut dalam kegiatan dimaksud secara bersama. Melalui cara ini maka secara perlahan-lahan hubungan sosial diantara mereka dapat tumbuh secara baik, dan rasa kepercayaan yang kuat antara sesama warga yang berkonflik dapat dikembalikan seperti keadaan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka dapat disimpulkan dari pendekatan dan hasil wawancara Informan terhadap indikator-indikator yaitu:

Pertama, faktor yang menjadi potensi konflik antar warga di Negeri Kataloka sebelum pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebelum tahun 2010 yaitu menguatnya sikap egois antar warga. Sikap egois ini tampak pada masing-masing individu maupun kelompok yang berkonflik yang tidak bersedia mengalah, dan senantiasa mengklaim kebenaran masing-masing. Persoalan yang berkaitan dengan potensi konflik yang belum terkelola secara baik, lebih bersifat pribadi, atau lebih bersifat internal, namun dapat menyeret kelompok karena keterkaitan hubungan saudara. Potensi konflik yang nyata bersifat individu adalah berkaitan dengan persoalan dusun, batas tanah, juga ada kecemburuan sosial, dan adanya sikap saling curiga antar sesama warga dalam memperoleh bantuan sosial.

Kedua, setelah pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2003, dan pelaksanaan Pilkada yang pertama pada tahun 2010 potensi konflik bergeser pada sikap saling mengejek antar pendukung dari calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur. Persaingan politik yang terjadi antar pendukung salah satu calon telah menyebabkan hubungan sosial antar warga makin renggang karena terjadi konflik antar pendukung dan menyebabkan warga tidak saling menyapa. Penyebabnya yaitu, pendukung kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu tidak merasa puas dengan hasil perolehan suara pada pelaksanaan Pilkada tahun 2010. Pasca Pilkada pada tahun 2015 potensi konflik ini berkembang menjadi konflik terbuka yang terjadi antar warga di Negeri Kataloka.

Ketiga, mengingat potensi konflik antar warga ini sudah ada sebelum masa Pilkada, sehingga pada masa Pilkada muncul sebagai pemicu konflik antar warga di Negeri Kataloka. Hal ini mulai tampak menjelang Pilkada tahun 2015 di mana dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh elite politik, calon Bupati dan Wakil Bupati, partai politik pendukung memberikan janji-janji politik yang tidak dapat diwujudkan setelah selesai Pilkada maupun selesai pelantikan Bupati. Sikap tidak percaya dari warga pendukung kepada pemimpin terpilih mulai tertanam. Isu yang berkembang yaitu korupsi, isu pemekaran desa karena dilakukan tidak sesuai dengan adat maupun aturan, dan isu anak daerah atau anak adat untuk diusung menjadi calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye berikutnya, digunakan sebagai strategi untuk merebut massa pendukung sehingga pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2015 memicu konflik antar warga. Selain itu juga hasil Pilkada berupa perolehan suara pada calon tertentu dianggap oleh warga tidak adil.

Keempat, potensi konflik yang telah menyebabkan konflik terbuka antar warga di Negeri Kataloka yaitu perkelahian, hidup saling bermusuhan, dan ada sebagian warga yang memisahkan diri dengan cara mendirikan tempat ibadah yang baru. Mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan potensi konflik antara warga maupun konflik terbuka adalah pendekatan sosial secara kekeluargaan pada pihak yang berkonflik oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh Pemerintah Negeri Kataloka. Kenyataannya, cara pendekatan yang dilakukan ini selama ini hanya bisa meredam gejolak yang terjadi dalam masyarakat akibat potensi konflik tidak terkelola secara baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mencoba memberikan sasaran-saran sebagai berikut :

Pertama, dalam menyelesaikan potensi konflik perlu melibatkan tokoh Pemerintah Negeri Kataloka, tokoh adat, maupun tokoh agama secara optimal. Melalui pendekatan secara sosial-budaya dengan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Negeri Kataloka, dipercaya potensi konflik dapat dikelola secara baik, dan tidak menimbulkan konflik terbuka antar warga pada masa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur berikutnya.

Kedua, masyarakat di Negeri Kataloka perlu belajar untuk menahan diri, baik itu secara individu maupun kelompok dalam menyikapi potensi konflik dan konflik terbuka di mana dapat merugikan mereka sendiri dalam membangun kehidupan sosial secara lebih baik di waktu mendatang untuk memperkuat relasi sosial antar warga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bactiar, Bachtiar, 2013, *Sosiologi Klasik, Dari Comte Hingga Parsons*, Cetakan keempat, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [2] Badrun, Ubedilah, 2016, *Sistem Politik Indonesia, Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- [3] Bedi, Maksudi, Iriawan, 2015, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Crawely, John and Graham, k. 2002. *Mediaton for Managers: Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Gremedia, Jakarta.
- [5] Dan, Nimmo, 2010, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek (Pengantar : Jalaludin Rahkmat)*, Rosda Karya, Bandung.
- [6] Duverger, Maurice, 2013, *Sosiologi Politik*, Cetakan 14, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [7] Duverger, Maurice, 2013, *Sosiologi Politik*, Cetakan 14, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8] Fahmi, Khairul (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat (Kata pengantar : Prof Dr Saldi Isra*, Radjawali Press, Jakarta.
- [9] Laurence, Boule, 1996, *Mediaton Principle Proces Praticce*. Sydney, Butterworths.
- [10] Maksudi, Bedi, Iriawan, 2015, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [11] Marijan, Kacung, 2011, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cetakan ke-2, Perdana Media Group, Jakarta.
- [12] Mufti, Muslim dan H. ahmad Syamsir, 2016, *Pembangunan Politik*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.
- [13] Muluk, Hamid, 2010, Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- [14] Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmoderen (edisi kedelapan)*. University Of Maryland, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [15] Sanit, Arbi (2007). *Sistim Politik Indonesia (kestabilan Kekuatan Politik dan Pembangunan)*. Penerbit: Radjawali Press Jakarta.
- [16] Paloma, M, Margaret, 2007, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [17] Pariela, D, Tonny, 2008, *Damai Di Tengah-Tengah konflik, Preserved Sosial Capital Sebagai Basis Survival Strategy*, Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Universitas Kristen Satya Wacana.
- [18] Sanit, Arbi, 2014, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- [17] Sen, Armatya, 2016, *Kekerasan Dan Identitas*. Penerbit : CV. Margin Kiri Regensi Melati Mas, Tangerang Banten.
- [18] Suharizal, 2011, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang)*, Radjawali Press, Jakarta.
- [19] Scott, John, 2013, *Sosiologi The Key Concepts*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [20] Weber, Max, 1957, *The Theory of Social and Economic Organization*. New York and London: The Free Press.
- [21] Wirawan, 2013, *Konflik dan Management Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*, Salembah Humanika, Jakarta.
- [22] Wulansari, Dewi, 2009, *Sosiologi : Konsep dan Teori*, Cetakan pertama, Rafika Aditama, Bandung.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN